

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu sistem kelembagaan yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Nur & Susanto (2020) pemerintahan adalah sistem yang digunakan negara untuk mengatur dan mengendaikan masyarakat guna mencapai kesejahteraan. Secara umum, pemerintah juga dipahami sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara yang melibatkan interaksi pemerintah dan masyarakat. Sampai saat ini pemerintahan berperan sebagai lembaga formal yang diakui secara politik dan menjadi pelaksana utama kewenangan negara dalam sistem ketatanegaraan. Di berbagai negara, sistem pemerintahan dikembangkan untuk menjamin stabilitas politik, menjaga kepentingan publik, serta mendukung penerapan nilai-nilai demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintah yang baik atau yang biasa disebut *Good Governance* dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat segala prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam menata kehidupan suatu bangsa. Praktik tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Kata “baik” dalam “tata pemerintahan yang baik” berarti efisiensi efektif dan

fungsional pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik juga tertuang dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pedoman Permendagri pengelolaan keuangan daerah yang baik dirumuskan dengan lima indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Prihatini & Kurniawan (2023) menemukan bahwa prinsip tata pemerintahan yang baik dapat dicapai melalui partisipasi masyarakat (*participation*), kepastian/aturan (*rule of law*), transparansi (*transparance*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), berorientasi consensus (*consensus orientation*), keadilan (*fairness*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), dan terakhir visi strategis (*strategic vision*).

Salah satu upaya untuk menerapkan *good governance* yaitu melalui penerapan pengendalian internal. Pengendalian Internal penting bagi Instansi, karena semua data yang masuk ke Instansi harus diverifikasi. Sistem pengendalian internal mencakup seluruh prosedur dan alat yang telah ditetapkan untuk melindungi aset dan data perusahaan, memeriksa ketepatan data, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Aktivitas dalam pengendalian internal menjadi penting untuk dibahas karena tidak jauh berbeda dengan aktivitas lain seperti berbisnis, produksi, hingga legalitas barang (Kamal, 2023).

Salah satu sistem yang digunakan dalam instansi pemerintah yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP adalah sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Bariun (2026) SPIP merupakan sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi pemerintah. Pada umumnya sistem pengendalian internal diterapkan bukan hanya pada instansi pemerintahan tetapi juga pada organisasi maupun perusahaan. Salah satu sistem pengendalian internal digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi setiap proses pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pengendalian internal pada pengelolaan keuangan juga digunakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kecurangan, dan penyalahgunaan wewenang.

Pengendalian Internal pada pengelolaan keuangan digunakan untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Syaepudin et al., 2024). Sasaran pertanggungjawaban dalam hal ini mencakup laporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi proses penerimaan,

penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah juga dituntut untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien, dan efektif atau belum. Dalam konteks pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan mengharuskan adanya tanggung jawab yang menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan anggaran, hingga penyusunan laporan anggaran. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah memiliki hak untuk mendapatkan informasi sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban. Upaya mewujudkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah, saat ini telah menjadi perhatian penting dalam pengelolaan keuangan negara.

Penelitian mengenai *good governance* dan sistem pengendalian internal pada pengelolaan keuangan telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Makalikis et al. (2022) tentang *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Manado menjelaskan bahwa dalam penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, responsibilitas sudah diterapkan dengan baik. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Matondang et al. (2025) tentang sistem pengendalian internal dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di Kota Medan menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal memberikan kontribusi

yang signifikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kota Medan.

Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Noerchoirunisa (2023) tentang *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Pedeslohor menjelaskan bahwa penerapan dari 9 prinsip *good governance* terdapat 4 prinsip yang belum optimal diterapkan oleh Desa Pedeslohor yaitu partisipasi, transparan, akuntabilitas dan responsive. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Khadijah & Intan (2025) tentang peran dan penguatan sistem pengendalian internal dalam mewujudkan prinsip *good governance* di Pemerintah Kota Batam menjelaskan bahwa penguatan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tercapainya *good governance*, serta diperlukan strategi peningkatan pengawasan dan kualitas SDM pengelola keuangan daerah.

Penerapan prinsip *good governance* perlu dilakukan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tegal. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tanggung jawab Sekretariat DPRD dalam mengelola keuangan secara efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, belum optimalnya koordinasi antarbagian dalam pelaporan keuangan, serta perubahan standar harga pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kedisiplinan SDM dan kurangnya kesadaran pegawai dalam menyampaikan informasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kelancaran proses pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan sehingga diperlukan penguatan melalui penerapan prinsip *good governance* yang didukung oleh sistem pengendalian internal guna mewujudkan akuntabilitas keuangan di Sekretariat DPRD Kota Tegal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ingin membahas tentang “**Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* dan Peran Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Sekretariat DPRD Kota Tegal**”.

1. 2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dan peran sistem pengendalian internal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Sekretariat DPRD Kota Tegal?

1. 3 Tujuan Peneliiian

Untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* dan peran sistem pengendalian internal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Sekretariat DPRD Kota Tegal

1. 4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini tidak hanya menambah wawasan dan pengetahuan terkait penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan sistem pengendalian internal di Sekretariat DPRD Kota Tegal, tetapi juga menambah jalan untuk mengembangkan pengetahuan yang secara

teoritis diteliti di Prodi DIII Akuntansi.

2. Manfaat Secara Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman serta pengetahuan untuk penulis bagaimana penerapan prinsip *good governance* dan pengendalian internal pada Sekretariat DPRD Kota Tegal.

b. Bagi Universitas Harkat Negeri Tegal

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang serta menambah jumlah kepustakaan.

c. Bagi Sekretariat DPRD Kota Tegal

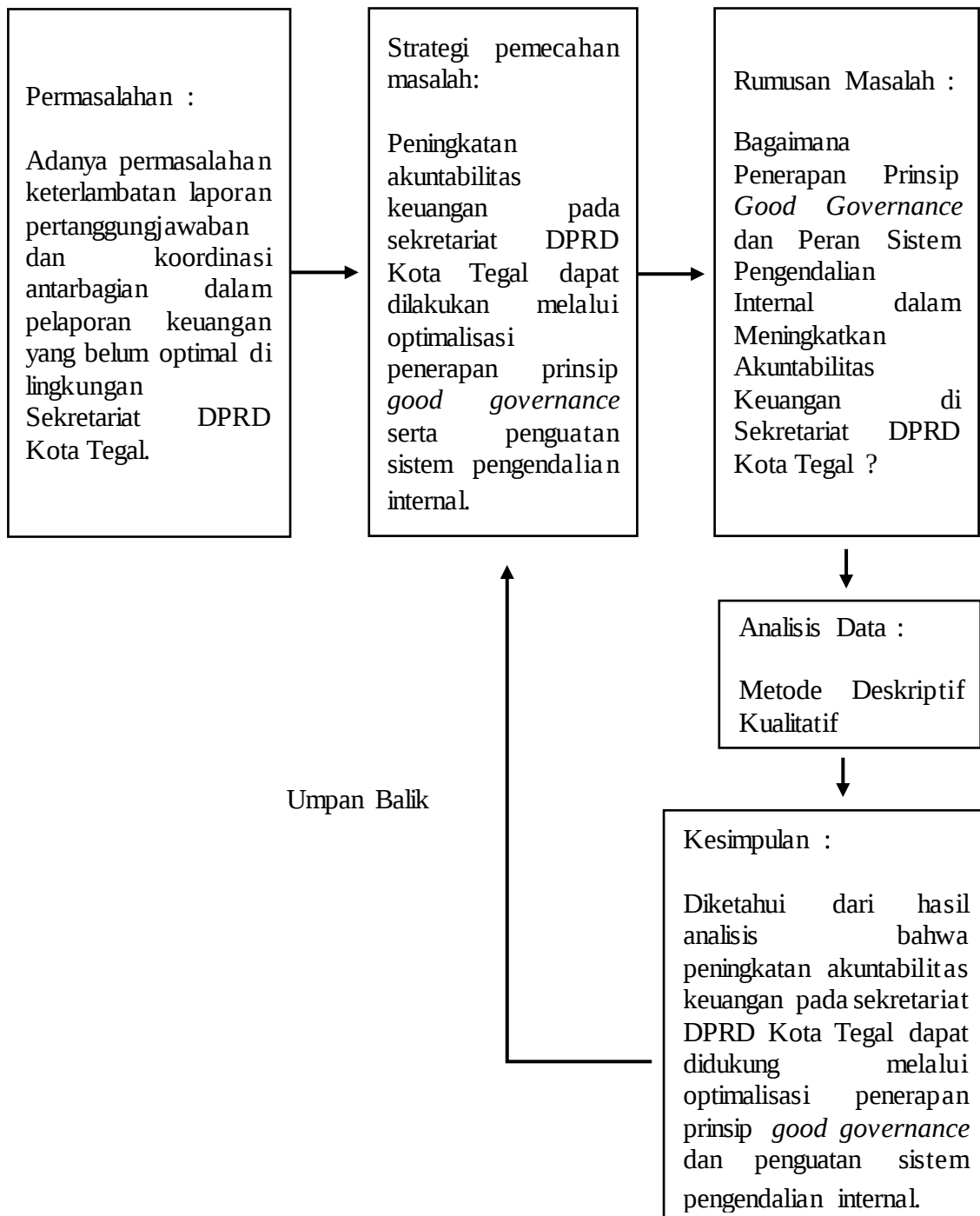
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi Sekretariat DPRD Kota Tegal.

1. 5 Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih fokus, terarah, maka permasalahan dibatasi pada Prinsip *Good Governance* dan Peran Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pada Sekretariat DPRD Kota Tegal.

1. 6 Kerangka Berpikir

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu indikator utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik, atau yang biasa disebut *good governance*. Serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan keandalan laporan keuangan. Dengan adanya akuntabilitas dan pengendalian internal yang baik, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.. Namun pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Tegal masih menghadapi kendala dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan secara optimal. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disederhanakan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber : Data diolah, 2026.

1. 7 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal yang berisi halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi.

Bagian Awal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membuat teori-teori tentang memuat teori mengenai prinsip-prinsip good governance, sistem pengendalian internal, serta konsep akuntabilitas .

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian Bagian Akhir.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literature yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Peneliti, Kartu Konsultasi, serta data data lain yang diperlukan.